

ABSTRAK

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mendorong peran Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang memproduksi sertifikat hak atas tanah, tapi sekaligus membantu pemilik tanah untuk bisa memperoleh alat bukti hak dan memberdayakan tanah guna meningkatkan kesejahteraan. Berbagai permasalahan juga terjadi dalam pendaftaran tanah seperti adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon, kesalahan informasi yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang langsung ke kantor pertanahan, menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan administrasi yang harus disiapkan dalam proses awal pendaftaran tanah.

Permasalahan dalam tesis ini: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mempercepat kepastian hukum Hak Atas Tanah melalui PTSL (2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal (3) Apakah kendala dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan .

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *socio-legal research*, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka , Obserasi dan wawancara. Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Kebijakan pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah melalui PTSL dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah berupa sertifikat bagi masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar ,adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (2) Pelaksanaan Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dimulai dengan melakukan perencanaan kegiatan PTSL yang sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan melakukan pra inventarisasi calon lokasi dan calon peserta (3) Kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal diselesaikan secara efektif sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Saran dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya, untuk mengurangi sengketa yang eskalasinya terus bertambah, Bagi Pemerintah : pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL harus betul betul dilaksanakan secara sistematis, mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagi Masyarakat : peran aktif dalam memberikan informasi yang akurat tentang kepemilikan maupun tanda batas sangat diperlukan.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Mempercepat Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, PTSL

ABSTRACT

The implementation of the Complete Systematic Land Registration program encourages the role of the Regency / City Land Office not only as an institution that produces certificates of land rights, but at the same time helps land owners to obtain evidence of rights and empower land to improve welfare. Various problems also occur in land registration such as the misinformation provided by the applicant, misinformation provided by the applicant due to the lack of proactivity of the community as the applicant to come directly to the land office, asking what matters are the administrative requirements that must be prepared in initial process of land registration.

Problems in this thesis: (1) What is the Government's policy in accelerating the legal certainty of Land Rights through PTSL (2) How is the implementation of PTSL activities at the Kendal District Land Office (3) What are the obstacles and efforts made to resolve them.

The approach method used in this study is the method of socio-legal research, research specifications are descriptive analytical, the types and sources of data collected in this study are primary data and secondary data, secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and legal material tertiary. Data collection techniques used are literature studies, Observations and interviews. Problems are analyzed by the theory of legal certainty, the theory of justice and the theory of expediency.

The results of this study are: (1) Government policy in accelerating land registration through PTSL is intended to provide legal certainty of land rights in the form of certificates for the community based on the principles of simple, fast, smooth, fair, equitable and open and accountable so as to improve welfare and prosperity community and economy of the country and reduce and prevent land disputes and conflicts (2) The implementation of PTSL activities at the Kendal Regency Land Office begins by planning systematic PTSL activities by the Head of the Kendal District Land Office by pre-inventorying prospective locations and prospective participants (3) Constraints faced both internally and externally in the implementation of PTSL at the Kendal Regency Land Office was completed effectively so that it could be completed on time and on target.

Suggestions in this study in accordance with the purpose of land registration is to provide legal certainty and protection to the rights holders, to reduce disputes which escalate continuously, For the Government: the implementation of land registration through PTSL must be carried out systematically, covering the entire territory of the Republic of Indonesia. Society: an active role in providing accurate information about ownership and boundary signs is very necessary.

Keywords: *Government Policy, Accelerating Certainty of Land Rights Law Certainty, PTSL*